

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dengan berkembangnya perekonomian dan teknologi saat ini, setiap negara pasti mempunyai pemerintahan yang baik. Pemerintahan yang baik merupakan wujud keberhasilan dalam membangun negara sesuai dengan tujuan yang direncanakan. Untuk mencapai hal ini, setiap pemerintahan harus memiliki kemampuan mengelola sumber daya dalam proses pengelolaan keuangan dan penyajian pelaporan keuangan. Laporan keuangan merupakan bentuk pertanggung jawaban atas pengelola keuangan (Rivan & Maksun, 2019). Oleh karena itu, pemerintah sebagai pengelola keuangan negara harus mempertanggungjawabkan uang rakyat dalam bentuk laporan keuangan pemerintah.

Saat ini, negara menghadapi banyak peluang untuk pembangunan dan reformasi. Perubahan pembangunan, antara lain diwujudkan melalui kebijakan otonomi daerah yang diatur dalam Undang-Undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa setiap pemerintah daerah mempunyai hak dan kewajiban mengatur dan mengurus sendiri setiap urusan pemerintahan daerahnya (Sumarno & Hakim, 2023). Serta Undang-undang No. 25 tahun 1999 tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah yang telah direvisi dalam UU No. 33 tahun 2004 memberikan tanggung jawab yang lebih luas kepada pemerintah daerah. Hal ini menjadikan sistem akuntansi keuangan dan pengendalian internal adalah hal yang penting untuk mewujudkan sebuah laporan keuangan yang baik, dimana pemerintah daerah sebagai pengelola keuangan negara bertanggung jawab secara horizontal kepada DPRD dan masyarakat luas (Sulistiawan et al., 2019).

Berdasarkan hal itu, pemerintah daerah menerbitkan Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Adapun sistem akuntansi pemerintah berperan sebagai konsep dasar penyusunan dan pengembangan standar akuntansi di pemerintahan.

Hal ini merupakan acuan bagi komite standar akuntansi pemerintahan dalam mencari pemecahan atas sesuatu masalah yang belum diatur dalam sistem akuntansi pemerintah (Lasabuda et al., 2020).

Laporan keuangan merupakan hasil akhir dari suatu proses akuntansi, agar informasi keuangan yang disajikan bermanfaat bagi para pengguna laporan keuangan. Untuk itu, proses penyajiannya harus berdasarkan pada standar akuntansi yang berlaku. Suatu laporan keuangan haruslah memenuhi kualitas laporan keuangan yang sesuai dengan kerangka konseptual akuntansi (Arista et al., 2023). Dalam konsep Islam, seorang muslim harus berpegang teguh pada ketentuan-ketentuan Allah SWT. Islam telah menerapkan sistem pencatatan yang penekanannya pada kebenaran, kejujuran dan keadilan antara kedua belah pihak sejak zaman Nabi Muhammad SAW, sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S Al-Baqarah ayat 282:

بِالْعَدْلِ كَاتِبٌ بَيْنَكُمْ وَلْيُكْتَبْ فَكُتِبُوهُ مُمْسَىٰ ۖ إِلَىٰ بَدْنٍ تَدَايِنْتُمْ إِذَا أُمُّوا الَّذِينَ يَأْتِيهَا
يُبْحَسْنَ وَلَا رَبَّهُ ۗ اللَّهُ وَلِيَّتِ الْحَقُّ عَلَيْهِ الَّذِي وَلِيْمَلِلَّ فَلْيُكْتَبْ اللَّهُ عَلَّمَهُ كَمَا يَكْتُبُ أَنْ كَاتِبٌ يَأْبَ وَلَا
وَلِيَّهُ ۗ فَلْيَمَلِلْ هُوَ بِمَلٍّ أَنْ يَسْتَطِيعَ لَا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ سَفِيهًا الْحَقُّ عَلَيْهِ الَّذِي كَانَ فَإِنْ شِئْنَا مِنْهُ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berutang piutang (bertransaksi) untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu mencatatnya. Hendaklah seorang pencatat di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah pencatat menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkannya. Hendaklah dia mencatat (nya) dan orang yang berutang itu mendiktekan (nya). Hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya...” (Q.S Al-Baqarah Ayat 282)

Ayat di atas menjelaskan bahwasanya Allah SWT memerintahkan mencatat semua bentuk muamalah (transaksi) yang mengakibatkan perubahan dalam aset perorangan atau organisasi baik pemerintah pusat maupun daerah. Ayat ini disebut pula sebagai landasan akuntansi syariah karena adanya perintah pencatatan transaksi keuangan. Transaksi keuangan merupakan bagian penting dari kegiatan ekonomi, sehingga

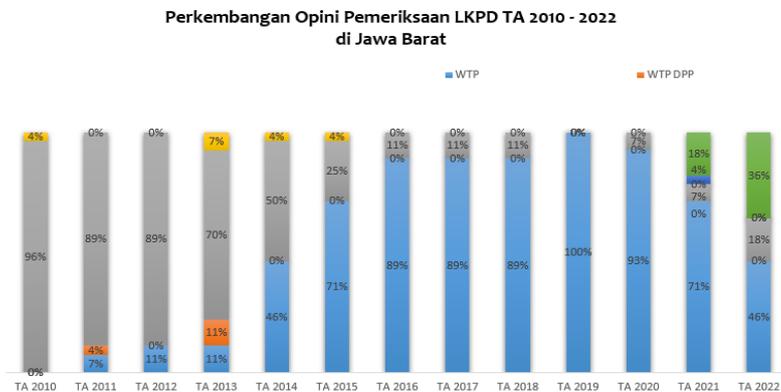
pelaksanaannya harus memperhatikan nilai-nilai Islam. Dalam akuntansi yang digunakan sebagai dasar pencatatan adalah bukti transaksi. Bukti ini harus bebas dari penipuan, sehingga perlu adanya sistem akuntansi dan pengendalian internal dari pihak yang berkompeten (Nikmatuniayah et al., 2020).

Fenomena yang terjadi pada sektor publik saat ini adalah pemerintah daerah diminta untuk membuat laporan keuangan yang baik yang mana kualitas laporan keuangan ini mencerminkan tertib pengelolaan keuangan pemerintah daerah, guna terwujudnya *good governance*. *Good government governance* adalah sebuah pemerintahan yang sangat diimpikan oleh seluruh masyarakat Indonesia, dimana pemerintahannya berjalan dengan baik tanpa adanya Korupsi, Kolusi dan Nepotisme yang dilakukan oleh pejabat daerahnya (Khamim, 2021).

Penelitian ini bertempat di Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Cirebon. Badan Keuangan dan Aset Daerah merupakan salah satu badan pendukung pemerintahan daerah khususnya pada bidang keuangan. BKAD mempunyai tugas membantu bupati dalam melaksanakan fungsi pendukung masalah pemerintahan di bidang keuangan yang menjadi wewenang daerah serta tugas pembantuan yang diberikan daerah. Dalam hal ini, BKAD mengelola keuangan daerah secara tertib dan transparan untuk mendukung pemerintahan yang bersih dan berkualitas.

Laporan keuangan yang disajikan harus berkualitas. Laporan keuangan dianggap berkualitas apabila memenuhi karakteristik informasi keuangan yang akan berguna bagi pengambilan keputusan, dan juga menjadi cerminan untuk dapat mengetahui apakah suatu pemerintahan telah berjalan dengan baik. Laporan keuangan yang baik sangat penting bagi pemerintah karena informasi dalam laporan harus relevan dan dapat diandalkan. Jika tidak, pengguna tidak akan dapat menggunakan atau mempercayai informasi tersebut. Proses pelaporan keuangan pemerintah daerah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) yang berlaku, dan laporan keuangan daerah harus diaudit oleh Badan Pemeriksa

Keuangan (BPK). Kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah dapat tercermin dari hasil pemeriksaan BPK (Puspita, 2023).



Gambar 1.1 Rekap Hasil Opini Pemeriksaan LKPD di Jawa Barat

(Sumber: Data BPK RI, Tahun 2024)

Berdasarkan data BPK, dalam Hasil Pemeriksaan LKPD Tahun 2022 memuat 541 (99%) LKPD yakni BPK memberikan 500 opini WTP (92,4%), 38 opini WDP (7%), dan 3 opini Tidak Menyatakan Pendapat (TMP) (0,6%). Seluruh hasil LKPD 9 entitas pemeriksaan yang diserahkan pada tahun 2022 meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) termasuk Kabupaten Cirebon. Pemerintahan Kabupaten Cirebon meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sebanyak tujuh kali berturut-turut sejak tahun 2015-2022 dari BPK RI. Raihan WTP ini merupakan penilaian BPK Perwakilan Jawa Barat terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Pemeriksaan laporan keuangan bertujuan memberikan opini kewajaran laporan keuangan dan menyakinkan stakeholders bahwa laporan keuangan telah disusun sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), patuh terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, serta didukung dengan desain dan implementasi Sistem Pengendalian Internal (SPI) yang memadai, dengan berpedoman pada Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN). Selain memberikan opini, BPK mengungkapkan 6.965 temuan yang memuat 11.910 permasalahan kelemahan sistem pengendalian internal (SPI) dan ketidakpatuhan. Permasalahan tersebut meliputi 5.366 permasalahan kelemahan SPI dan

6.544 permasalahan ketidakpatuhan sebesar Rp2,35 triliun. BPK tetap mengungkapkan temuan tersebut dan memberikan rekomendasi untuk perbaikan di masa yang akan datang. (BPK RI, 2022).

Menurut BPK, Pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah belum maksimal dalam memperbaiki sistem pengendalian internal sebagai mana yang tercantum dalam pasal 58 UU Perbendaharaan Negara. Laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon masih mendapat catatan atau temuan dari BPK. Sehingga dari temuan BPK tersebut menjadi dasar pertimbangan pemerintah dalam meningkatkan kinerja yang lebih baik untuk menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. Saat ini, didalam laporan keuangan pemerintahan masih banyak disajikan pelaporan keuangan yang tidak sesuai, seperti adanya kasus pencatatan keuangan yang belum dilakukan atau tidak akurat, pengendalian atas pengelolaan pendapatan daerah yang belum memadai, kesalahan penganggaran atas belanja pegawai, belanja barang dan jasa serta belanja modal, kelebihan pembayaran pada pekerjaan luar, ketidaklengkapan dokumen pertanggung jawaban belanja perjalanan dinas, dan pelaksanaan APBD yang tidak sepenuhnya melalui mekanisme. (LHP BPK-RI, 2022).

Pemerintah daerah tentunya memerlukan pegawai yang berkompeten dan memiliki kemampuan dalam menyusun laporan keuangan sesuai dengan metode dan prinsip akuntansi pemerintah. Pengetahuan dan keterampilan dalam bidang akuntansi ini sangat penting untuk dapat mengelola informasi keuangan dengan baik. Dengan demikian, kemampuan yang unggul dalam akuntansi menjadi poin utama bagi pegawai di organisasi sektor publik untuk mengelola dan menghadirkan informasi keuangan dengan baik, sehingga laporan keuangan yang dihasilkan mampu memenuhi standar kualitas yang diharapkan, dan juga kerjasama yang baik antara Pemerintah Kabupaten Cirebon dengan seluruh *stakeholders* akan mendukung pencapaian kinerja dan ekspektasi masyarakat (Octaviana, 2023).

Mengingat telah menghadapi Covid-19, pemerintahan masih berupaya untuk menyesuaikan kembali adaptasi baru mengenai pelaporan

keuangan daerah. Penerapan Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) merupakan salah satu tantangan bagi Kabupaten Cirebon dalam menjalankan seluruh sendi kehidupan bermasyarakat. Seluruh penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Cirebon harus disesuaikan dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan mengedepankan keselamatan masyarakat. Penataan ulang program, kegiatan maupun target kinerja merupakan suatu keharusan untuk menyelaraskan dengan kondisi di lapangan rencana kerja pemerintah Kabupaten Cirebon. Untuk itu, lebih dibutuhkan penanganan serius dalam mengelola laporan keuangan dengan lebih memperhatikan upaya penerapan sistem akuntansi keuangan dan pengendalian internal (RLPPD, 2021).

Terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintahan daerah yang dibahas dalam penelitian ini, *Pertama*, yaitu sistem akuntansi keuangan daerah. Sistem akuntansi keuangan daerah merupakan salah satu dari banyak variabel yang dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Sistem akuntansi merupakan rangkaian prosedur yang dimulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran sampai dengan pelaporan keuangan dalam pelaksanaan APBD dengan menerapkan SAP yang sesuai. Oleh karena itu, hal ini sangat diperlukan karena suatu kesatuan yang apabila tidak diterapkan maka akan sulit memperoleh laporan keuangan yang berkualitas (Indrayani & Widiastuti, 2020).

Faktor lain dari kualitas laporan keuangan juga ditentukan oleh pengendalian internal. Pengendalian Internal merupakan seperangkat dan prosedur untuk melindungi aset atau kekayaan dari segala bentuk tindakan penyalahgunaan, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan efektivitas manajemen, dan ketaatan terhadap peraturan yang berlaku (Rahmany & Fatimah, 2020). Dengan diterapkannya pengendalian internal, manajemen akan menekankan pentingnya pengendalian dalam laporan keuangan. Laporan keuangan yang memiliki kualitas nilai yang baik, tidak terlepas dari penerapan pengendalian internal yang baik. Jika sistem pengendalian internal

diterapkan secara efektif oleh pimpinan dan seluruh pegawai pemerintahan, akan ada keyakinan bahwa kegiatan pelaporan keuangan daerah akan efektif dan efisien.

Dalam Islam, pengendalian internal tersirat pada Q.S Al-Baqarah ayat 282. Ayat ini dimaksudkan untuk memelihara hak keuangan masyarakat. Pengendalian internal juga mempunyai kaitan erat dengan sifat amanah. Amanah adalah suatu sifat manusia yaitu dapat dipercaya, amanah dalam Islam bukanlah merupakan suatu kiasan belaka namun ada tanggung jawab yang besar di dalam sifat tersebut (Ruci & Lestary, 2022). Hal ini dapat diketahui dari salah satu hadits yaitu: *"Tidak ada iman yang sempurna bagi orang yang tidak memiliki sifat amanah, dan tidak ada agama yang sempurna bagi orang yang tidak menepati janji"* (H.R. Ahmad). Untuk itu jika pengendalian internal baik, maka segala kegiatan terutama di bidang keuangan akan berjalan sesuai dengan prosedur sehingga mampu menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas.

Keberadaan laporan keuangan setiap daerah memerlukan pertimbangan lebih lanjut akan kegunaan laporan tersebut, bukan hanya bersifat kewajiban sebagai sumber informasi dalam menentukan dan mengambil kebijakan pembangunan pertumbuhan di daerah. Laporan keuangan yang disiapkan oleh pemerintah daerah akan digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan oleh berbagai pemangku kepentingan. Oleh karena itu, pemerintah daerah harus memperhatikan faktor dalam laporan keuangan untuk perencanaan, pengendalian dan pengambilan keputusan. Dengan adanya sistem akuntansi dan pengendalian internal diharapkan semua bentuk pelaporan keuangan baik pusat maupun daerah dapat dikelola dengan baik sehingga dana masyarakat dikelola secara transparan, ekonomis, efisien, efektif dan bertanggung jawab (Puspa & Prasetyo, 2020).

Dalam penelitian Fauziyyah (2019) menunjukkan bahwa sistem akuntansi keuangan daerah dan sistem pengendalian internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Kemudian, menurut Sri (2024) menyatakan bahwa sistem

pengendalian internal dapat memediasi dampak Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan Penerapan Sistem Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) terhadap kualitas laporan keuangan pada Instansi Pemerintah ABC. Hal ini dikarenakan sistem akuntansi dan pengendalian suatu daerah mampu memberikan laporan keuangan yang memiliki pengidentifikasian yang memadai, ukuran dan pencatatan yang relevan serta laporan keuangan dapat menjadi pedoman untuk pengambilan keputusan.

Namun, terdapat juga hasil penelitian yang berpendapat bahwa sistem akuntansi keuangan daerah tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Seperti penelitian Rahayu dan Kanita (2023) menyatakan bahwa sistem akuntansi keuangan pemerintah daerah dan pemanfaatan teknologi informasi secara parsial tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Selanjutnya penelitian menurut Nuramal (2022) memperoleh hasil bahwa sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Penelitian Ardianto dan Eforis (2019) menunjukkan bahwa sistem akuntansi keuangan daerah tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Berdasarkan uraian latar belakang dan masalah di atas, maka hal ini dapat dilakukan penelitian lebih lanjut untuk memperoleh hasil yang dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk mengangkat penelitian dengan judul **“Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah dengan Pengendalian Internal sebagai Variabel Intervening Pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cirebon”**.

B. Perumusan Masalah

1. Identifikasi Masalah

a. Wilayah Kajian

Penelitian ini mengkaji mengenai Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah dengan Pengendalian Internal sebagai Variabel Intervening Pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cirebon. Penelitian ini tergolong dalam wilayah kajian *Public Sector Accounting* dengan topik kajian Akuntansi Keuangan Daerah.

b. Jenis Masalah

Jenis masalah pada penelitian ini mengenai pengaruh nilai kualitas laporan keuangan daerah yang dapat diukur dengan sistem akuntansi keuangan daerah dan pengendalian internal sebagai variabel intervening atau mediasi dengan dibantu oleh software SPSS Statistik 26 for windows.

c. Pembatasan Masalah

Pembatasan masalah perlu dilakukan dalam sebuah penelitian guna menghindari meluasnya cakupan pembahasan masalah dalam penelitian. Oleh karena itu, penulis membatasi masalah yang diteliti agar tidak terjadi perluasan masalah serta agar penelitian ini menjadi lebih terarah. Dengan demikian, pembatasan masalah dalam penelitian ini hanya pada untuk mengetahui pengaruh sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan daerah dengan pengendalian internal sebagai variabel intervening pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cirebon.

2. Rumusan Masalah

Dilihat dari penjelasan latar belakang diatas dapat diidentifikasi terkait dengan beberapa masalah pokok yang dibahas, sehingga muncul pertanyaan-pertanyaan peneliti sebagai berikut:

- a. Apakah sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerah?

- b. Apakah sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh terhadap pengendalian internal?
- c. Apakah pengendalian internal berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerah?
- d. Apakah pengendalian internal dapat memediasi pengaruh sistem akuntansi keuangan daerah dan kualitas laporan keuangan daerah?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui pengaruh sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan daerah.
- b. Untuk mengetahui pengaruh sistem akuntansi keuangan daerah terhadap pengendalian internal.
- c. Untuk mengetahui pengaruh pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan daerah.
- d. Untuk mengetahui pengaruh pengendalian internal sebagai variabel intervening (mediasi) antara sistem akuntansi keuangan daerah dan kualitas laporan keuangan daerah.

2. Kegunaan Penelitian

Dalam suatu penelitian atau pembahasan suatu masalah yang dilakukan tentunya diharapkan dapat memberi manfaat dan berguna bagi pihak-pihak yang tertarik dan berkepentingan dengan masalah-masalah yang diteliti dan dibahas, diantaranya adalah:

1) Bagi Penulis

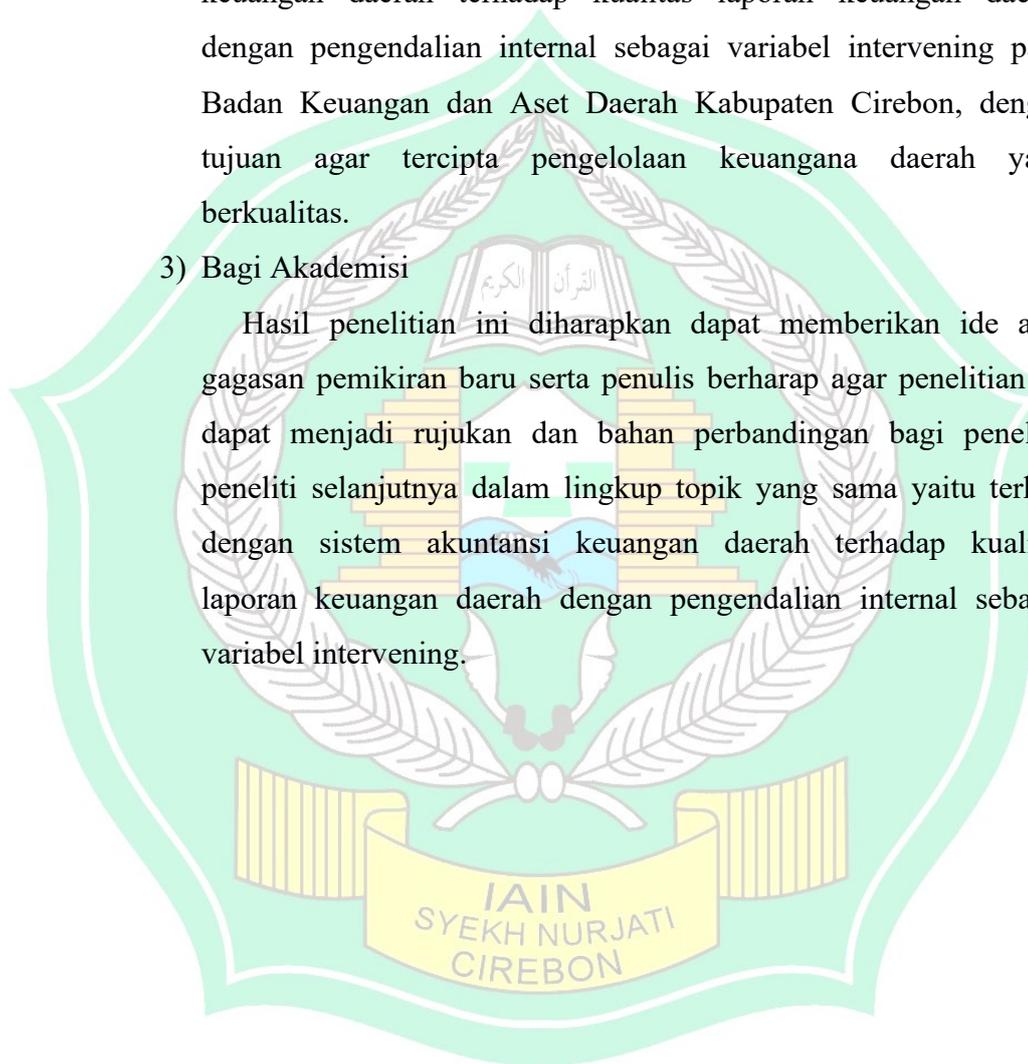
Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai sarana pembelajaran untuk menambah pengetahuan terkait pengaruh sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan daerah dengan pengendalian internal sebagai variabel intervening pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cirebon.

2) Bagi Praktisi

Penelitian ini diharapkan akan menambah wawasan baik bagi penulis dan masyarakat luas tentang kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, dan dapat menjadi bahan evaluasi serta membantu pihak organisasi baik sektor publik maupun sektor privat khususnya untuk mengetahui pengaruh sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan daerah dengan pengendalian internal sebagai variabel intervening pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cirebon, dengan tujuan agar tercipta pengelolaan keuangan daerah yang berkualitas.

3) Bagi Akademisi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan ide atau gagasan pemikiran baru serta penulis berharap agar penelitian ini dapat menjadi rujukan dan bahan perbandingan bagi peneliti-peneliti selanjutnya dalam lingkup topik yang sama yaitu terkait dengan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan daerah dengan pengendalian internal sebagai variabel intervening.



D. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini bertujuan untuk memberikan gambaran umum dan pemahaman kepada pembaca tentang penelitian yang telah diuraikan oleh peneliti.

BAB I PENDAHULUAN, menjelaskan secara umum terkait permasalahan penelitian yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, identifikasi masalah, tujuan penelitian dan manfaat dari penelitian.

BAB II KAJIAN PUSTAKA, berisi uraian dari teori-teori yang digunakan peneliti untuk membahas masalah yang meliputi teori sistem akuntansi keuangan daerah, pengendalian internal dan kualitas laporan keuangan daerah. Pembahasan mengenai *literatur review* atau penelitian terdahulu dan kerangka pemikiran serta hipotesis penelitian.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN, membahas mengenai bagaimana rencana yang akan peneliti lakukan dalam penelitiannya. Tujuannya untuk menjawab hipotesis penelitian pada bab ini berisi diantaranya tempat dan waktu penelitian, populasi dan sampel, definisi operasional variabel, instrumen penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN, dalam bab ini akan berisi mengenai hasil yang diperoleh dari pengolahan data melalui metode yang digunakan kemudian akan dianalisis dan dideskripsikan.

BAB V PENUTUP, dalam bab terakhir ini berisi kesimpulan dan saran dari hasil yang telah diperoleh dan dideskripsikan.